

---

## PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM MITIGASI BENCANA DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Cahyadi

Universitas Sebelas April

---

### Article Info

#### Article history:

Received Aug 30, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 18, 2024

---

#### Keywords:

Public Administration

Coordination

Disaster Management

Disaster Mitigation

---

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation of disaster mitigation at the Sumedang Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD), as well as identifying inhibiting factors and efforts made in disaster management. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. The research results show that the implementation of disaster mitigation at the Sumedang BPBD has gone well, especially in terms of communication, coordination, human resource competency, and outreach through the Disaster Resilient Village (DESTANA) program. However, there are obstacles in the performance of the Rapid Response Team caused by organizational conditions and limited human resources. Efforts to overcome these obstacles include increasing communication, synchronizing between implementers, and optimizing existing resources. Researchers recommend that BPBD make more efforts to develop disaster risk management programs, add supporting facilities, and regularize training to improve the quality of human resources. In this way, it is hoped that disaster management in Sumedang Regency can run more effectively and efficiently.*



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

---

### Corresponding Author:

Cahyadi

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: [c.purnama53@gmail.com](mailto:c.purnama53@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Kota/Kabupaten maupun Provinsi dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, "Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD."

Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan Desa Tangguh Bencana oleh BPBD merupakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana dan secara kelembagaan baik teknis maupun administratif dapat dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD. Menurut Indeks Resiko Bencana (IRB) yang di input oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, daerah di Jawa Barat memiliki tingkat resiko bencana yang cukup tinggi, salah satunya Kabupaten Sumedang dengan Indeks Resiko Bencana sedang.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Bandung. Seperti halnya kabupaten lain, kabupaten yang memiliki luas wilayah 153.124 ha dan jumlah penduduk hampir satu juta jiwa. Kondisi wilayah Kabupaten Sumedang yang memiliki luas wilayah yang besar dan sebanding dengan tingkat kerentanan bencana alam yang terjadi harus menjadi perhatian yang tidak bisa dihindarkan. Keadaan geografis Kabupaten Sumedang memiliki jenis wilayah dengan bentang permukaan tanah berupa perbukitan mengakibatkan bencana alam yang terjadi sangat bervariasi seperti longsor, banjir, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan serta jenis bencana alam lainnya.

Berikut adalah data bencana alam yang terjadi pada tahun 2023 berdasarkan data badan penanggulangan bencana kabupaten sumedang:

**Tabel 1. Data Bencana Alam Tahun 2023**

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Tahun 2023
1	Tanah longsor	86
2	Banjir	12
3	Pohon tumbang	11
4	Kebakaran hutan	3
5	Kebaran dan Angin puting beliung	25

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, krusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU24/2007) Bencana adalah suatu kejadian, yang di sebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan rusaknya lingkungan, kejadian ini diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya. Mengetahui hal tersebut pemerintah bergerak cepat dengan membentuk berbagai lembaga yang bertugas dalam hal penanggulangan bencana.

## 2. METHOD

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Sugiyono (2017: 9), metode kualitatif adalah: Penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Handyaningrat (Ramdhany & Djumiarti, 2016: 5-7) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui:

- a. Komunikasi;
- b. Kesadaran pentingnya koordinasi;
- c. Kompetensi sumber daya manusia yang terlibat koordinasi;
- d. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi; dan
- e. Kontinuitas perencanaan.

Menurut Tosi dan Carrol (Moekijat, 1982: 99) masalah-masalah koordinasi timbul karena dua hal, yakni karena kondisi organisasi dan karena masalah sumber daya manusia. Masalah yang timbul karena kondisi

organisasi adalah masalah organisasi yang terjadi karena unit-unit yang berlainan mempunyai kegiatan yang berlainan yang harus diselesaikan, tetapi kegiatan tersebut mempunyai jadwal waktu yang berlainan. Masalah yang timbul karena faktor sumber daya manusia adalah yang berhubungan dengan kompetensi atau perkembangan di antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau bagian-bagian di dalam organisasi.

Dalam pengukuran terhadap upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan koordinasi akan menasar pada substansi dari teori sebagaimana disebutkan oleh Tosi dan Carrol (Moekijat, 1982: 99) yaitu:

a. Kondisi organisasi

- 1) Subsistem silang antar bagian, beberapa kegiatan subsistem organisasi dilakukan dalam bagian-bagian formal yang berlainan.
- 2) Perbedaan jadwal waktu, kegiatan dalam organisasi memerlukan jumlah waktu yang berlainan untuk penyelesaiannya.
- 3) Jarak geografis, jarak antara orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan yang saling bergantung terlalu jauh untuk memungkinkan adanya sering hubungan tatap muka, maka timbullah masalah koordinasi.

b. Faktor manusia

- 1) Persaingan mengenai sumber daya, kelompok-kelompok dapat bekerja lebih mudah dan sasaran kelompok dapat lebih mudah mencapainya apabila mereka mempunyai sumber daya, uang, atau modal fisik yang memadai
- 2) Perbedaan dalam status dan arus pekerjaan, koordinasi yang kurang baik berkembang tidak hanya karena urutan arus pekerjaan dalam suatu organisasi, tetapi juga karena hubungan kerja adalah sedemikian rupa sehingga individu-individu dari kelompok-kelompok yang statusnya lebih tinggi mengenai apa yang harus dilakukan.
- 3) Tujuan-tujuan yang bertentangan, mengakibatkan pertentangan antara kedua kelompok yang harus mengkoordinasi kegiatan-kegiatan mereka.
- 4) Pandangan, sikap, dan nilai yang berlainan. Sumber pertentangan yang sering terjadi adalah kecenderungan suatu kelompok untuk menilai ide-ide, usul-usul, dan ciptaan kelompok lain.
- 5) Wewenang dan penunjukan pekerjaan yang meragukan. Tugas-tugas memerlukan pekerjaan dari dua kelompok atau lebih, maka ada kemungkinan sulit menunjukkan tanggung jawab dengan tepat atau menentukan pujian yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaan yang baik. Usaha menguasai atau memengaruhi, perbedaan dalam status dan kekuasaan berhubungan dengan tuntutan-tuntutan yang ditentukan terhadap organisasi oleh lingkungannya dan oleh kemampuan kelompok tertentu untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan paling baik akan cenderung mempunyai status dan kekuasaan yang paling banyak dalam suatu organisasi

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### **Pelaksanaan Mitigasi Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang**

Dalam segi dimensi komunikasi Informasi mengenai mitigasi bencana sudah jelas. Komunikasi dilaksanakan berupa rapat, diskusi, atau bentuk-bentuk koordinasi selain itu juga menggunakan media Whatapps dan juga komunikasi bersifat otomatis ketika terjadinya bencana. Dalam segi dimensi kesadaran pentingnya koordinasi pengetahuan terkait koordinasi untuk semua anggota/staff sudah berjalan baik. koordinasi dapat ditunjukkan dengan adanya keikutsertaan para pelaksana dalam setiap rapat untuk mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan dan juga mitigasi bencana

Dilihat dari segi dimensi kompetensi sumber daya manusia dari segi keefektikan koordinasi sudah berjalan dengan baik dan seefektif mungkin walaupun ada beberapa hambatan seperti kurang jelasnya informasi sesegera di perbaiki dan berjalan sesuai dengan pedoman yaitu prosedur.

Dalam dimensi kesepakatan dan komitmen melakukan sosialisasi- sosialisasi baik langsung terjun lapangan maupun lewat media sosial dan terbentuknya program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dalam rangka mitigasi bencana. Dalam segi dimensi kontinuitas perencanaan mekanisme umpan balik dilakukan dalam bentuk evaluasi. Dalam pelaksanaan mitigasi bencana ini terdapat mekanisme evaluasi yang diprakarsai oleh unsur pemerintah daerah, dengan salah satu fungsinya yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi bencana.

#### **Faktor penghambat tidak optimalnya kinerja Tim Reaksi Cepat BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang**

Pertama ada faktor kondisi organisasi, koordinasi juga bersifat lintas sektor di mana ada perbedaan secara organisasional antara pemerintah daerah dengan BPBD. Dalam hal koordinasi bagaimana pun kondisi dan waktu tetap berjalan dengan baik karena sudah adanya acuan bagi setiap pelaksanaan mitigasi bencana. Kedua ada dimensi faktor manusia sumber daya di BPBD terbatas, serta perbedaan anggaran yang dimiliki pun berpengaruh pada cara masing-masing dalam bekerja dan juga perbedaan status dan jabatan terkadang

menjadi hambatan apabila hubungannya dengan tingkat yang lebih tinggi kepada pihak eksternal sedangkan pada pihak internal sendiri tidak terlalu menjadi hambatan yang berarti.

#### **Upaya yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Sumedang untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang**

Upaya mengatasi hambatan dalam kondisi organisasi seperti upaya yang dilakukan adalah menjalin komunikasi sebaik-baiknya, sinkronisasi dan menyadari posisi satu sama lain dan adanya perbedaan jadwal waktu antar pelaksana merupakan hal yang normal. Upaya mengatasi hambatan dalam faktor manusia seperti upaya ditingkatkan seperti komitmen yang diperkuat dan optimalisasi sumber daya yang ada, menjaga dan merawat kesamaan tujuan di antara para pelaksana yang terlibat. Penyelarasan juga diperlukan apabila diketahui ada tujuan-tujuan yang melenceng dari kesepakatan awal.

#### **4. CONCLUSION**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mengupayakan program - program terkait dengan upaya penanggulangan resiko bencana dan membuat dokumen-dokumen mengenai upaya penanggulangan bencana. Memaksimalkan kembali program DESTANA (Desa Tangguh Bencana) lebih sering dalam memeberikan edukasi terkait penanggulangan bencana. Mengikutsertakan anggota reralawan dan DESTANA (Desa Tangguh Bencana) untuk mengikuti pelatihan terkait penanggulangan bencana agar mempuni dalam penanggulangan bencana dari segi pengetahuan dan bersertifikasi.

Sebaiknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melengkapi dengan menambah fasilitas pendukung seperti EWS (Early Warning System) atau alat pendeteksi adanya indikasi-indikasi bencana daerah yang rawan terjadinya bencana, BPBD juga harus menjalin hubungan yang baik dengan intansi - intansi yang lain agar bisa membantu memfasilitasi dalam penanggulangan bencana. Contohnya untuk alat- alat berat seperti bulldoser, dan beko yang berfungsi sebagai pembersih material-material yang terdampak bencana, yang sering bekerjasama dengan intansi lain. dengan melengkapi fasilitas yang mendukung diharapkan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencan Daerah dapat berjalan dengan lancar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang perlu merutinkan kembali terkait pelatihan pada sumber daya manusia, agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pegawainya yaitu dari bidang kebencanaan

#### **REFERENCES**

- Akadun, 2005. Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah. Bandung CV Maulana Ardana, Komang. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Assauri, Sofjan. (2012). Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT Raja Grafindo. Atmosudirdjo, Prajudi, (1982). Administrasi dan Management Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, H.M., Burhan. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Djaali dan Pudji Mujono. (2008). Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: Grasindo.
- Dwiyanto, Agus, (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Effendy, Onong Uchjana, (2009). Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Emzir. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fathoni, Abdurahmat. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rineka Cipta.
- Moekijat. (1991). Koordinasi Suatu Tinjauan Teoretis. Bandung: Mandar Maju.
- Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Saefullah. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.
- Steers, R.M and Porter, R. W. (1983). Motivation and Work Behavior. New York: Mc Graw Hill.
- Sugandha, D. N. (1991). Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. 2020. (Metode Penelitian Administrasi Metode R&D). Bandung: Alfabeta.
- Suhardan, Dadang. (2011). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Thoha, Miftah. (1984). Aspek-aspek Pokok Ilmu Administrasi. Suatu Bunga Rampai